**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Konsep Administrasi Negara**

Administrasi Negara adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan apartur Negara atau pemerintah untuk mencapai tujuan Negara secara efisien. Administrasi Negara merupakan suatu bahasan Ilmu sosial mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga administratif, yudikatif dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Terdapat hubungan interaktif antara administrasi negara dengan lingkungan sosial, diantara berbagai unsur lingkungan sosial, unsure budaya merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi penampilan (Performance) administrasi negara. Adapun beberapa definisi mengenai administrasi negara yang di kemukakan oleh beberapa para ahli.

**Sondang P. Siagian (2001: 4)** dalam bukunya **"Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strategi”** mengemukakan bahwa: **“Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.**

**The Liang Gie** yang dikutip oleh **Drs. Ulbert Silalahi, M.A. (2011:9)** dalam bukunya **“Studi tentang Ilmu Administrasi”** mengemukakan bahwa: **“Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu”.**

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi mencakup seluruh kegiatan, dari pengaturan hingga pengurusan kelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama.

1. **Pengertian adminstrasi dalam arti luas dan sempit**
2. **Administrasi dalam arti luas berarti keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan-kegitan yang di dasarkan pada rasionl tertentu oleh dua orang atau lebih dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan saran dan prasaran tertenu pula. (Siagian, 2001:267).**
3. **Administrasi dalam arti sempit berkisar pada berbagai kegiatan ketatausahaan. Kegiatan-kegiatan ketatausahaan merupakan bagian yang sangat peniting dari kegiatan organisasi terutama karena kegitan tersebut menyangkut penanganan informasi yang dikatakan berperan sebagai ”Darah” bagi suatu organisasi. Dalam pengertian yang demikian adminitrasi hanya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan ketatausahaan yang mencakup korespondensi, keseketariatan, penyusunan laporan dan kearsipan. (Siagian, 2001:267)**

Apabila definisi admnistrasi secara luas itu disimak dengan benar, akan terlihat bahwa administrasi dalam merupakan salah satu komponen dari administrasi dalam arti luas.

1. **Pengertian Administrasi Negara**

Istilah administrasi Negara ialah terjemahan dari *“Public Administrations”*. Istilah ini lahir bersamaan dengan lahirnya Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada sekitar tahun 1956. Jika istilah Public Administration itu di uraikan secara etimologis, maka *“Public”* berasal dari bahasa Latin *“Poplicus”* yang semula dari kata *“Populus”* atau *“People”* dalam bahasa Inggris yang berarti rakyat. *“Administration”* juga berasal dari bahasa Latin, yang terdiri dari kata *“ad”* artinya intensif dan *“ministrare”* artinya melayani, jadi secara etimologis administrasi berarti melayani secara intensif.

**Dimock, Dimock dan Koening** dalam bukunya **“Public Administration”** yang diterjemahkan oleh **Sahya Anggara (2012:134)** dalam bukunya **“Ilmu Administrasi Negara”,** mengemukakan : **“Administrasi Negara adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah dan cara mereka memperolehnya”.**

Oleh sebab itu, ilmu Administrasi Negara tidak hanya mempersoalkan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga melakukannya. Sejalan dengan pendapat di atas, **Thoha (2008:10)** mengemukakan bahwa **“pengetahuan administrasi yang diterapkan dalam kegiatan politik atau Negara atau pemerintahan itulah administrasi negara”.**

Objek disiplin ilmu administrasi Negara adalah pelayanan publik sehingga yang perlu dikaji adalah keberadaan berbagai organisasi publik. Maka **Lloyd** **D. Musolf dan Harold Seidman** dalam tulisan mereka berjudul **“The Blurred Boundaries of Public Administration”**, melihat pada batasan-batasan administrasi publik. Hal ini karena bagi mereka tampak bahwa setiap keadaan yang bertambah maju, pemerintah pada semua tingkat memberikan tanggung jawab aktivitas yang penting dan kompleks, namun ada lembaga yang semu (apakah yang bersangkutan termasuk lembaga administrasi pemerintah atau swasta).

1. **Fungsi Administrasi**

Pada dasarnya fungsi administrasi dan fungsi manajemen adalah sama perbedaannya dimana fungsi administrasi adalah untuk menentukan tujuan organisasi dan merumuskan kebijkanaan umum, sedangkan manajemen bersifat melaksanakan kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan yang dirumuskan.

Dalam proses pelaksanaan ini, administrasi mempunyai tugas-tugas tertentu yang harus dilakukan sendiri dan tugas-tugas itulah yang biasanya disebut sebagai fungsi-fungsi adaministrasi antara lain:

1. *Planning* (perencanaan)

Perencanaan adalah suatu rincian yang merupakan organisasi yang besar didalamnya ada penyususnan dan perumusan terencana diserahkan kepada sekelompok staf perencanaan, akan tetapi penetapannya merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen.

1. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisaian adalah suatu kegiatan yang menyangkut tipe-tipe struktur organisasi dan prinsip-prinsipnya, sejarah organisasi, gaya manajerial yang tepat digunakan, sifat dan jenis dari berbagai bentuk kegiatan yang harus dilaksanakan.

1. *Leading* (kepemimpinan)

Kepemimpinan merupakan fungsi manajemen yang melibatkan penggunaan pengaruh untuk memotivasi karyawan meraih sasaran organisasi.

1. *Controlling* (pengendalian)

Pengendalian adalah pengertian keempat yang mempunyain arti memantau aktifitas karyawan, menjaga organisasi agar tetap berjalan kearah pencapaian sasaran, dan membuat koreksi bila diperlukan.

 Fungsi yang dijalankan pada administrasi kantor tersebut sangat mendekati dengan fungsi-fungsi dalam teori sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari, adanya pengelolaan surat menyurat yang merupakan petunjuk pelaksanaan sumber daya yang ada pada karyawan sehari-hari adanya struktur organisasi dan pembagian tugas, motivasi, pelatihan dan pengembangan karyawan dan sebagainya.

1. **Pengertian Kebijakan**

Kebijakan pada dasarnya diartikan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan tindakan-tindakan yang terarah. Kata kebijakan adalah terjemahan dari kata Inggris *“policy”* kata *“policy”* diterjemahkan dengan “kebijakan” yang berbeda artinya dengan kata “*wisdom”* yang artinya ‘kebijaksanaan”. Kebijakan mempunyai definisi yang komples dan beragam yang tidakhanya menitik beratkan pada satu disiplin ilmu saja, namun harus didasarkan pada berbagai disiplin ilmu lainnya seperti ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, ilmu antropologi dan lain-lain.

**Subarsono (2005:3)** dalam bukunya **“Analisis Kebijakan Publik”** mengemukakan : **“Kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati”.**

**Lasswell** dan **Kaplan (1979)** yang dikutip oleh **Uyat Suyatna (2009:3)** dalam bukunya **“Kebijakan Publik”,** mengemukakan: **“Kebijakan itu berisi suatu program kegiatan yang mengandung nilai-nilai tertentu dan kegiatannnya diarahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.**

**Friedrich (1969: 79)** yang dikutip oleh **Agustino (2016: 16)** dalam bukunya **“Dasar-Dasar Kebijakan Publik”** memberikan pengertian atas definis kebijakan publik sebagai berikut:

**Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.**

Berdasarkan pengertian di atas bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang individu, kelompok atau pemerintah dalam menghadapi sebuah masalah dalam ruang lingkup suatu lingkungan. Kebijakan ini digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah-masalah sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Melihat kepada pengertian mengenai kebiajakan diatas maka kebijakan itu berbeda dengan keputusan, kebijakan tidak sepenuhnya dapat dibedakan dari administrasi, tapi kebijakan mencakup prilaku dan harapan, serta ada tidaknya tindakan, kebijakan mempunyai hasil akhir, kebijakan mempunyai tujuan, dan sasaran balik secara ekplisit maupun implisit, kebijakan muncul dari suatu proses, kebijakan meliputi hubungan antara organisasi maupun intra organisasi, kebijakan publik menyangkut lembaga-lembaga pemerintah serta kebijakan dirumuskan dan didefinisikan secara subyektif.

**Anderso** yang dikutip oleh **Agustino (2016: 17)** dalam bukunya **“Dasar-Dasar Kebijakan Publik”** memberikan pengertian atas definis kebijakan publik sebagai berikut : **“Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.**

Konsep kebijakan ini menitik beratkan pada yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.

1. **Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan suatu kunci paling penting dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Cara tersebut di transformasikan melalui program-program kebijakan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses Implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli kebijakan **Mazmanian** dan **Sabatier** yang dikutip oleh **Agustino (2016: 128)** dalam bukunya **“Dasar-Dasar Kebijakan Publik”** sebagai berikut :

**Pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau pun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin dicapai,dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.**

**Lester** dan **Stewart Jr.** yang dikutip oleh **Agustino (2016: 129)** dalam bukunya **“Dasar-Dasar Kebijakan Publik”** sebagai : **“Implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output)*, yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih”.**

**Grindle** yang dikutip oleh **Agustino (2016: 129)** dalam bukunya **“Dasar-Dasar Kebijakan Publik”** sebagai berikut :

**Pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada *action* program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.**

Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur inilah suatu masalah publik dapat diselesaikan atau tidak.

**Udoji** yang dikutip oleh **Agustino (2016: 129)** dalam bukunya **“Dasar-Dasar Kebijakan Publik”** dengan mengatakan bahwa :

**Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada formulasi kebijakan. Kebiajakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak dilaksanakan.**

**Van Meter** dan van **Hom** yang dikutip oleh **Solichin (2012: 135)** dalam bukunya **“Analisis Kebijakan”** mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai : **“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.**

Dari beberapa takrifan seperti tertuangan di atas dapat di ketahui bahwa impelemntasi kebijakan berkaitan dengan tiga hal, yakni: (1) adanya tujuan atau sasaran, (2) adanya aktivitas atau (3) dan adanya hasil. Namun ini saja belum cukup. Ini karena implementasin merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

**Tachjan (2006:25)** dalam bukunya “**Implementasi Kebijakan Publik”**, megemukakan bahwa :

**Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui, kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Kebiajakan mengandung logika *top-down* maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.**

Ukuran keberhasilan maupaun kegagalan dari suatu kebijakan sebagian besar ditentukan dari implementasi kebijakan.

**Nugroho (2003:158)** dalam bukunya **“Kebijakan Publik”**,mengemukakan bahwa : **“Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut”.**

Berdasrkan pengertian tersebut bahwa dalam proses mengimplementasi kebijakan publik ada dua pilihan yaitu, langsung mengimplementasikan dari bentuk program-program atau mengimplementasikan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat jalur birokrasi, melainkan lebih dari menyangkut masalah konflik, keputusan dan dampak yang akan timbul jika suatu kebijakan di implementasikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan tahap yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Kebijakan dapat berjalan efektif apabila implementasi kebijakan dilaksanakan dengan maksimal.

1. **Tahap-Tahap Kebijakan**

Proses pembatuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyususnan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita di dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda.

1. Tahap penyususnan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu dapat untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhinya, beberapa masalah mungkin tidak di sentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda waktu yang lama.

1. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebiajakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

1. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan elit, jika program tersebut tidak di implementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya financial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa impelemntasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

1. Tahap penilaian kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau di evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat mampu memecahkan masalah. Kebijkan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriterian-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

1. **Model pendekatan Impelementasi Kebijakan**

Berikut ini beberapa model pendekatan implementasi kebijakan publik, yaitu :

1. Model Metter dan Horn.

Model yang dikembangkan oleh Metter dan Horn dikenal dengan istilah *“a model of the implementation”.* Ada 4 variable yang dipengaruhi kinerja kebijakan publik :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan (*dispostition)* para pelaksana
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Social dan Politik
7. Model Mazmanian dan Sabatier

Model ini dikenal dengan istilah *“a framework for policy implementation analysis”,* mereka menekankan pentingnya kemampuan mengidentifikasikan variable yang mempengaruhi tujuan formal dari seluruh proses implementasi. Ada 3 variable yang mempengaruhi tujuan formal kebijakanpublik :

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi :
2. Kesukaran-kesukaran teknis
3. Keberagaman perilaku yang diatur
4. Preselitas prsentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok
5. Sasaran tingkat dan ruang lingkup perubahan prilaku yang dikehendaki
6. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat
7. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai
8. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan
9. Ketetapan alokasi sumberdana
10. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana
11. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana
12. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termasuk dalam Undang-Undang
13. Akses formal pihak-pihak luar
14. Variable-variable diluar Undang-Undang yang mempengaruhi implementasi
15. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi
16. Dukungan publik sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat
17. Dukungan publik
18. Sikap dansumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat
19. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana
20. Model Edward III

Model yang ditawarkan dikenal dengan *“direct and indirect impact on implementation”.* Ada 4 variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik :

1. Komunikasi : Transmisi, kejelasan dan konsistensi
2. Sumberdaya : Staf, Informasi, Wewenang dan Fasilitas
3. Disposisi :Pengangkatan birokrasi dan insentif
4. Struktur birokrasi : Kondusif, Kerjasama, Koordinasi Standar Operating Sistem dan Fragmentasi
5. Model Grindle

Model yang dikembangkan dikenal dengan istilah *“implementation as a political and administrative process”* menurut Grindle ada dua variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih, dimana keberhasilan tersebut dapat dilihat dari dua hal :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai, dimensi ini diukur dengan dua faktor, yaitu :
3. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
4. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadai

Keberhasilan suatu Implementasi Kebijakan Publik, juga amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas :

1. *Content of policy* (isi atau subatansi kebijakan)
2. *Interest affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
3. *Type of benefits* (tipe manfaat)
4. *Extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)
5. *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan)
6. *Program implementer* (pelaksana program)
7. *Recources committed* (sumber daya yang digunakan)
8. *Context of policy*
9. *Power, interest, and strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)
10. *Instituation and regime characteristic* (karakteristik dan rezim yang berkuasa)
11. *Compliance and responseveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)
12. **Pengertian Waralaba**

Waralaba menurut Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.259/MPR/Kep/1997 tentang Ketentuan dan tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba, yaitu adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual satu penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki oleh pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam rangka menyediakan dan atau penjualan barang dan jasa.

Kemudian pengertian waralaba menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tentang waralaba, revisi atas Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1997 dan Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan No.259/MPR/KEP/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba menjelaskan bahwa Waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perorang atau badan usaha/jasa yang telah terbukti hasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasaarkan perjanjian waralaba.

Adapun Waralaba Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor. 12 Tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba, pusat perbelanjaan dan toko modern waralaba adalah merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

1. **Kerangka Pemikiran**

Berbagai indikator telah dikembangkan untuk dapat mengukur keberhasilan Implementasi suatu Kebijakan Publik karena biasanya suatu kebijakan itu mudah dalam formulasinya akan tetapi dalam mengimplementasikannya sangatlah sulit.

Berikut ini adalah model Implementasi Kebijakan yang dikembangkan oleh **Edward III** yang dikutip oleh **Agustino (2016:136)** dalam bukunya “**Dasar-Dasar Kebijakan Publik”** sebagai berikut :

1. **Komunikasi**
2. **Sumberdaya**
3. **Disposisi**
4. **Struktur Birokrasi**

Indikator Implementasi kebijakann tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Komunikasi**

**Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi, diantaranya: Transmisi, penyalur komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistori ditengah jalan. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah suatu konsistensi dan jelas.**

1. **Sumberdaya**

**Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staff. Diperlukan staff yang ahli dan mampu dalam mengimplemantasikan sutau kebijakan. Yang kedua adalah informasi, brhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, implementator harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Wewenang, harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Fasilitas, faslilitas merupakan faktor penting dalam implemantasi kebijakan tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.**

1. **Disposisi menurut George C Edward III**

**Disposisi merupkan sikap dari pelaksanaan suatu kebiajakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.**

1. **Struktur birokrasi menurut Edward lll, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi.Walaupun sumber-sumber untuk melaksankan suatu kebijakan kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebagiankan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menjadi penghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan yang telah di putuskan secara politik dengan kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebagiankan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menjadi penghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kbijakan yang telah di putuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.**

Implementasi pada dasarnya berkaitan dengan proses, hasil, aktivitas dan tindakan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan agar dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kondisi dan situasi yang lebih baik. Proses merupakan suatu jenjang waktu dari pelaksanaan terhadap program-program yangn telah dirumuskan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berjalan tidaknya suatu implementasi tergantung prosesnya, hasil merupakan suatu yang didapatkan setelah suatu program dilaksanakan, aktivitas berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur dalam melaksanakan program-program. Tindakan merupakan prilaku dari aktor yang melaksanakan implementasi dalam hal ini adalah aparatur pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Suatu implementasi biasanya berkaitan dengan suatu peraturan atau kebijakan dalam suatu daerah. Kebijakan merupakan suatu program-program yang dibuat oleh aktor-aktor baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi.

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

**Implementasi Kebijakam Penyelenggaraan Waralaba pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pandeglang**

Identifikasi Masalah :

1. Terdapat waralaba Indomart dan Alfamart yang melanggar Perda Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba di Kabupaten Pandeglang.
2. Kurang adanya pengawasan dari pihak DPMPPTSP dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba (Indomart/Alfamart) di Kabupaten Pandeglang
3. Belum adanya sanksi yang tegas terhadap pemilik usaha waralaba (Indomart/Alfamart) yang terbukti melakukan pelanggaran, sehingga mereka tidak memiliki efek jera
4. Masih kurangnya komunikasi dan koordinasi kerjasama yang efektif antar tim pelaksana teknis dan DPMPPTSP

Indikator Implementasi Kebijakan Menurut Edward III :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Untuk menilai sejauh mana ketercapaian kebijakan penyelenggaraan waralaba pada DPMPPTSP Kabupaten Pandeglang sesuai dengan kriteria penilaian yang peneliti pakai.

1. **Proposisi Penelitian**

Proposisi adalah suatu ekspresi verbal dari keputusan yang

**K. Proposisi Penelitian**

Proposisi adalah suatu ekspresi verbal dari keputusan yang berisi pengakuan atau pengingkaran sesuatu predikat terhadap suatu yang lain, yang dapat dinilai benar atau salah. Dalam hal ilmu sosial realita sosial biasanya diabstraksikan sebagai hubungan antara dua konsep. Hubungan logis antara dua konsep tersebut disebut proposisi. Untuk analisa yang sederhana, suatu realita sosial dapat digambarkan sebagai suatu proposisi, tetapi dalam analisa yang lebih kompleks realitas sosial sering digambarkan sebagai beberapa hubungan antara konsep atau proposisi. Proposisi merupakan ungkapan atau pernyataan yang dapat dipercaya, disangkal atau diuji kebenarannya, mengenai konsep atau konstruk yang menjelaskan atau memprediksi fenomena-fenomena. Proposisi yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris disebut hipotesis.

Proposisi tidak mempunyai format yang tertentu. Biasanya disajikan dalam bentuk suatu kalimat pernyataan yang menunjukan hubungan antara dua konsep. Menurut **Sugiono (2006 : 79)** menarik kesimpulan bahwa teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis, jadi secara umum teori mempunyai tiga fungsi yaitu untuk menjelaskan (*explanation)*, meramalkan *(prediction)*, dan pengendalian *(contol)* suatu gejala.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti membuat rumusan proposisi yang menghubungkan antara dua konsep sebagai berikut :

**Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Waralaba pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadau Satu Pintu di Kabupaten Pandeglang (studi kasus : pada jenis Minimarket Indomart dan Alfamart) ditentukan oleh, 1.Komunikasi 2.Sumber daya 3.Disposisi 4.Struktur Birokrasi.**

**Hambatan dan dukungan berpengaruh pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Waralaba pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pandeglang (studi kasus : pada jenis Minimarket Indomart dan Alfamart).**